

ABSTRAK

Rizaldi. Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Skripsi, Pembimbing Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *catfishing*, perlindungan hukum, kepolisian, Ditreskrimsus Polda Kalsel, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Penelitian ini berfokus pada peran lembaga kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penipuan identitas diri (*catfishing*) yang semakin marak terjadi di era digital. Fenomena *catfishing* melibatkan penggunaan identitas palsu oleh pelaku untuk menipu korban demi keuntungan pribadi, baik dalam bentuk finansial maupun emosional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam menangani kasus *catfishing* di wilayah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan korban *catfishing*, sementara data sekunder berasal dari kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ditreskrimsus Polda Kalsel mencakup upaya preventif, seperti edukasi publik dan pengawasan, serta tindakan represif dalam bentuk penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya teknis, serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di kepolisian, serta perluasan kampanye kesadaran publik mengenai risiko penipuan identitas online. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang berkembang pesat.

